



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL (LAMSAMA)

Keputusan Menkumham: AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021

Keputusan Menristekdikti: T/496/M/OT.00.00/2019; 2 Agustus 2019

Office: Gedung Laboratorium Multidisiplin FMIPA UI Lantai 5 Jl. Margonda Raya, Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Phone: +62 81296733848

Website: <https://lamsama.or.id>; Email: sekretariat@lamsama.or.id

PENGUMUMAN

No. 001/LAMSAMA/P.U/I/2026

Sehubungan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-00004/SPPKP-CT/KPP.3305/2026 tanggal 5 Januari 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Terhitung sejak tanggal 5 Januari 2026, **LAMSAMA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).**
- Menindaklanjuti pengukuhan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **setiap invoice/tagihan yang diterbitkan oleh LAMSAMA per tanggal 5 Januari 2026 akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.**

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Dewan Eksekutif LAMSAMA

Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.

Lampiran:

1. Surat Pengukuhan PKP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK SAWANGAN

JALAN SILIWANGI NO. 1 B/K, PANCORAN MAS, DEPOK, 16431
TELEPON (021)29867960; FAKSIMILE (021) 29867858; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-00004/SPPKP-CT/KPP.3305/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 0932692692021000
2. Nama : AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 05 Januari 2026 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Depok, 05 Januari 2026

